



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial Republik Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 3 Juni 2021
Waktu	: 14.40-16:53 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, PT 10270
Acara	: 1. Pembahasan lanjutan kebijakan data kemiskinan di Indonesia dan 21.000.000 data ganda penerima Bansos. 2. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan RKPT tahun 2022 (RKA K/L tahun 2022) 3. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022. 4. Evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021
Ketua Rapat	: H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Hadir	: 40 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: 1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN) 2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan) 3. H. Marwan Dasopang. ANGGOTA: FRAKSI PDI PERJUANGAN 4. Paryono, S.H., M.H. 5. Ina Ammania 6. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si. 7. Drs. Samsu Niang, M.Pd.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

8. Mohammad Saleh, S.E..
9. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

10. M. Husni, S.E., M.M.
11. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
12. Drs. H. Zainul Aifin
13. Drs. H. Saiful Rasyid, M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

14. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMtr.
15. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

16. Dra. Anisah Syakur, M.Ag.
17. H. Dedi Wahidi. S.Pd.
18. H. Maman Imanul Haq.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

-

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

19. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
20. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., M.A.
21. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

22. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

23. KH. Muslich Zainal Abidin

Anggota Izin

- :
1. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A.
 2. Selly Andriany Gantina, A.Md.
 3. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

Undangan

- : Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT :

PIMPINAN KOMISI VIII/ F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Selamat sore.

Salam Sejahtera buat kita semua.

Bu Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang kami hormati.

Para Anggota baik yang hadir secara fisik di ruang Komisi VIII maupun yang secara virtual.

Pada saat ini kita ada dua agenda Bu Menteri pertama kita melanjutkan dulu yang tertunda kemarin ya karena belum ada kesimpulan yaitu validasi dan verifikasi data karena muaranya adalah anggaran yang nanti kita juga akan dengarkan dari Bu Menteri untuk menyampaikan pengantar RAPBN Tahun 2022 termasuk evaluasi tahun 2021 yang sedang berjalan dan tahun 2020 yang sudah tuntas dijalankan.

Oleh karena itu mari kita berdoa sebelum semua rangkaian acara kita lakukan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing bagi yang beragama Islam mari kita baca Al-Fatihah.

BERDOA : MULAI

BERDOA : SELESAI

Bu Menteri yang kami hormati.

Bapak Ibu.

Sebagaimana tanggal 24 Mei 2001 di tempat yang sama kita membahas dalam Rapat Kerja tentang kebijakan verifikasi dan validasi data yang diawali dengan adanya temuan 21.000.000 ditidurkan oleh Bu Menteri ini perlu kita sama-sama sikapi secara bijak dan pada akhirnya saya katakan dari awal tadi adalah berujung dengan politik anggaran kita bersama DPR dan Pemerintah.

Oleh karena itu walaupun berdasarkan tata tertib ini skornya biasanya 24 jam Bu tapi ini sudah berjam-jam harap maklum ya karena banyak agenda dan Bu Menteri kita hormati juga banyak kesibukan oleh karena itu skor atau dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* rapat kerja dengan agenda verifikasi dan validasi data saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Baik, Bu Menteri kita skemanya begini kemarin itu ada beberapa Anggota yang belum sempat tanya Bu ya karena saya dituntut untuk itu nanti baru Bu Menteri jawab kita ambil kesimpulan tentang validasi data baru nanti kita persilakan Bu Menteri untuk menyampaikan pengantar dan bagi para Anggota kalau masalah anggaran tidak dibahas sekarang Bu Menteri nanti kita hari Kamis tanggal 9 Juni Bu Menteri ada konsinyering di Puncak Bu di Wisma DPR bersama seluruh Eselon I Kementerian Sosial Bu, jadi Ibu Menteri sorry tanggal 7 hari Senin kita tidak akan membahas anggaran hari ini tapi kita hanya mendengarkan pengantar dari Bu Menteri pendalaman dan segala sesuatu tentang yang disampaikan Bu Menteri akan kita bahas secara khusus di Wisma Kopo DPR.

Oleh karena itu Bu Menteri mohon di instruksikan seluruh Eselon I Bu supaya tidak ada yang absen dan tidak hadir karena itu sangat penting sebelum nanti kita akan bawa ke rapat kerja kembali untuk kita setuju sebagai sebuah anggaran yang akan kita sahkan untuk tahun 2022.

Kami persilakan mungkin dari Anggota masalah yang kemarin belum tanya verifikasi dan validasi data Pak Jefry belum kemarin itu Pak Iskan ya silakan Pak Jefry dulu tapi kalau misalkan sudah kira-kira tidak perlu pertanyaan lagi ya kita serahkan kepada Bu Menteri nanti ya silakan Pak Jeffry.

F- P. GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi VIII beserta teman-teman Anggota Komisi VIII dan juga Bu Menteri Sosial beserta seluruh jajarannya.

Menyimak dari yang sudah disampaikan pada rapat yang lalu kami sudah melihat bagaimana Ibu menjelaskan mengenai data yang 21.000.000 itu baik itu yang NIK-nya itu dobel ataupun namanya sama ataupun yang lainnya.

Tapi kemudian sebenarnya ini ada pertanyaan juga mengenai hal itu karena kalau menurut saya dari penjelasan seperti dobel data itu belum cukup *clear* jadi masalahnya begini kalau misalnya ada dobel data seharusnya kan itu ada yang memang kembali ke negara ya begitu tapi dalam hal ini ya uangnya juga habis begitu ya.

Ini Mungkin kami perlu penjelasan ini sebenarnya bagaimana ya jadi kalau rasanya kalau yang 21.000.000 ini masih belum *clear* saya rasa mungkin kita belum bisa membahas mengenai anggaran barangkali seperti itu demikian mungkin drai saya terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Silakan Pak Rudi Hartono dari Nasdem.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua Wakil Ketua.

Yang saya hormati Ibu Menteri, Dirjen, Sekjen dan jajaran.

Bu Menteri saya ingin bertanya dan ingin memberi masukan pertama saya ingin bercerita ini data mungkin yang dobel ini sudah 10 tahun lalu Bu mungkin Ibu dulu masih Kadis saya masih Ketua DPR juga Bu jadi setiap kami reses masyarakat tanya Pak Rudi ini saya susah janda kok tifka dapat bantuan katanya terus ada yang ini yang meninggal kok masuk di dalam data begitukan seperti itu waktu itu masa pemerintahan SBY saya ingat jadi banyak yang *ngeluh* terus begitu saya melapor ke Dinas ke Kementerian seperti kita pingpong begitukan.

Nah sekarang saya ingin tanya kepada Ibu ini ini harus dijelaskan rinci Bu yang tadi dibilang orang itu yang dobel itu yang mana yang dihapus yang kita kalau memang dobel ya kita hapus Bu jangan ditidurkan kalau ditidurkan artinya nanti bisa bangun lagi dia Bu kalau yang sudah meninggal ya hapus tidak mungkin ditidurkan lagi Bu.

Nah jadi banyak yang seperti itu Bu dan satu lagi banyak yang pindah Bu pindah alamat tapi namanya jadi ada disini dan disana misalnya saya Jakarta tapi saya ada di Tangerang jadi dapat 2 itu yang mungkin harus ditidurkan satu yang dimaksud Ibu dan ini harus benar-benar Bu karena kalau tidak 21.000.000 Ibu bilang dikalikan berapa ratus ribu penerima bantuan uangnya berapa Ratus Miliar Bu korupsi secara sistematis ini.

Jadi kesalahannya sebenarnya bukan masa sekarang sudah lama Bu dan kalau saya ingin memberi masukan ini salahnya juga di tingkat desa, kecamatan Bu bukan di kita ini mereka memberi data seenaknya saja asal saudara, *family*, kawan masukan dia kirim ke Kecamatan Kabupaten dan ke Jakarta kan begitu Bu akhirnya kita input seperti ini jadinya begitu dan sekarang buat pusing kita dan membuat pusing Ibu

Jadi saya ingin mengingatkan Bu Risma ini benar-benar Bu jangan hanya nanti tingkat Dirjen sudah laporan sama Bu menteri beres nanti Bu Menteri sudah tidak Menteri timbul lagi begitu. Itu dulu Bu saran saya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Rudi Hartono dari Nasdem kami ucapkan terima kasih kami persilakan dari sayap kanan Pak Iskan Qolba dari PKS.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang kami hormati Bu Menteri dan seluruh jajaran.
Pak Ketua dan teman-teman.

Ibu Menteri saya ini periode kedua di Komisi VIII ini ya kalau mungkin Ibu tanya teman-teman kementerian saya termasuk yang paling kritis tentang data ini dan ini tidak mudah tentunya kemarin saya baca di Koran Kontan

disitu dibilang menurut dugaan menurut saya masih dugaan. Dugaan KPK itu sekian bermasalah kemudian ada BPK ada satu lagi kalau tidak salah dari BPKP.

Jadi sebetulnya kalau kita lihat permasalahan utamanya itu adalah di Kementerian Sosial karena menurut Undang-Undang Kesra itu kan data orang-orang prasejahtera itu yang mengena itu adalah Kementerian Sosial. Nah ketika BPK mengatakan sesuatu seharusnya itu Kementerian itu jawab begitu

Umpamanya ada nama diduga sama namanya umpamanya Asep, Asep disana itu kan banyak apa yang membedakan itu Asep ini beda ini itu dari teknologi melihat dari matanya bisa atau mungkin dari KK-nya .

Seharusnya ini yang dijawab oleh Kementerian Sosial tapi kira-kira tiba-tiba Ibu Menteri Sosial itu bawa data ke KPK ada apa itu ini bukan hal yang mudah ini data dan periode yang lalu dari Komisi VIII sudah memberikan kalau tidak salah ratusan miliar itu untuk data itu bahkan punya kantor besar sekarang diitukan di Cawang itu sangat gagah sekali kita berharap data ini selesai salah satu penyebabnya itu datanya tidak beres-beres sampai hari kiamat kenapa karena tidak ada verifikasi di bawah yang profesional.

Kalau verifikasi selama ini Ibu serahkan ke Dinas Sosial ini bukan tugas saya saya tidak ada uangnya begitu dan kalau mereka memverifikasi data harus orang-orang yang di didik yang paham yang mengerti visinya Kementerian Sosial dan dia tidak memihak kepada politik praktis yang saya maksud politik praktis itu termasuk kepala daerah disitu bisa saja Bu ya di satu daerah itu kepala daerahnya dari Partai A Partai Bapak itu boleh-boleh saja tetapi data itu harus benar-benar dikendalikan oleh pusat nah ini yang belum terjadi.

Nah kita di DPR ini kalau saya lihat dari laporan Ibu yang kemarin itu dibulan April Mei itu kan sudah banyak itu apa namanya penyaluran bahkan ada yang penyalurannya melebihi kita tentukan umpamanya sekian sekian juta ternyata sudah melebihi ini bisa dianggarp juga apa namanya bagian dari korupsi kenapa karena setiap anggaran itu tidak bisa diselesaikan diujung harus diselesaikan dari awal itu yang disebut dengan perencanaan termasuk keputusan kita di DPR ini saya menemukan data ternyata banyak yang disalurkan itu melebihi Bu ini perlu kita pertanggung jawabkan kalau yang menerima itu cuma kerena kesalahan data tiba-tiba yang menerimanya orang memang miskin tetapi kalau sudah menerimanya tidak layak itu masalah lagi.

Nah saya lihat itu data ini sebetulnya sudah bagus selama ini karena selama ini kan yang kita putuskan ini sesuai jadi sekarang ini kalau Ibu kalau dalam bahasa artinya bahasa halus nya tidak dapat temukan mungkin Ibu acak-acak begitu ya saya maaf Pak Pimpinan belum menemukan kalimat yang pas begitu dimainkan kalau saya bilang jadi tidak cocok karena ini data.

Saya maaf Bu ya anak saya 20 tahun itu bisa mengelola membuat kecerdasan yang dibuat kalau sebetulnya *feeling* saya kemarin kita kasih anggaran besar di Kementerian Sosial media sosial sekitar Rp800.000.000,- memperbaiki data itu kan bisa dibuat kecerdasan sosial dalam sistem itu bisa

dia lacak ini yang salah ini yang apa itu bisa dilacak tapi tetap tidak menjadi apa tuntas selama belum ada verifikasi ke bawah.

Kalau umpamanya saya kemarin dikasih data saya Pak Sekretaris sekarang tidak dapat PKH lagi saya tanya tidak ada yang bisa jawab kenapa masalahnya katanya Ibu saya beda namanya di kampung orang kampung itu ada namanya Sumiati orang panggil itu Ati doang umpamanya iyakan pergilah ke Kepala Desa siapa namanya Ati begitu saja karena memang permasalahan kita E-KTP itu belum tuntas kalau E-KTP cuma satu data itu bias.

Jadi saya ini Pak Ketua menurut saya sebelum kita membahas anggaran ini kita tidak mau juga Bu kita tidak tahu apa-apa tiba-tiba nanti disalahkan DPR DPR itu mau menerima data yang tidak benar kemudian uang disetujui sudah kita tidak mendapatkan uangnya tiba-tiba kita dapat apa.

Jadi mohon maaf sekali kalau saya bilang itu datanya ini apa namanya berantakan itu mohon maaf saja kita pernah dulu melakukan suatu kunjungan di Eropa itu itu mereka bahkan pusat data itu dia Badan sendiri jadi yang pergi ke desa itu orang mengerti data apa yang mau ditanya kalau kita dicekal kemarin itu kepala-kepala desa bilang Ustadz Pak kenapa kalau kita ganti nama orang ini tiba-tiba anggarannya tidak masuk ke daerah kita berkurang rugi kami mendingan saya diam saja begitu jadi seperti itu karena kita tidak bisa memberikan wewenang kepada kepala desa untuk mendata.

Jadi menurut saya Bu Menteri ya jangan dulu buru-buru ini kalau memang Ibu-ibu ingin merubah data coba dibuat tim yang benar termasuk juga sistem itunya sistem apa siapa yang membuat data karena di dalam Undang-undang Kesra itu semua istilah kita semua seharusnya kan.

Contoh saja ini data kemiskinan di Indonesia itu dilaporkan oleh Presiden dalam disidang Paripurna itu sangat jelas itu sekitar 10, sekian taruhlah 10,2 oke 10 coba kalau kita yang menerima BPJS berapa jumlahnya 98.000.000 iyakan kalau jumlah penduduk Indonesia 270.000.000 itu seharusnya yang menerima BPJS itu Cuma 27.000.000 iyakan itu 89.000.000 di BPJS itu yang namanya BPI ya maaf Bu ya saya istri saya punya banyak (suara tidak jelas). Jadi mengerti masalah BPJS jadi yang bukan ini 89 itu sekarang kan bingung data mana itu seharusnya Kementerian Sosial berdasarkan Undang-undang Bu ya Kementerian Kesehatan dia tidak boleh menyalurkan BPJS BPI yang dibayar oleh negara tanpa ada persetujuan dari Menteri Sosial tanpa disetujui kenapa? Karena puncak data kemiskinan mohon maaf saya bilang pusat data prasejahtera lebih halus pusat data prasejahtera harus izin kementerian berdasarkan undang-undang yang boleh menggunakan data itu adalah kementerian sosial.

Jadi mohon maaf Bu coba ini dibereskan bukan hanya data di Kementerian Sosial itu data dari bahkan juga penyaluran apa namanya gas penyaluran gas itu juga ada kita tidak jelas kemana ada penyaluran gas ada penyaluran yang menerima listrik subsidi itu semuanya itu harus ada di Kementerian Sosial minimal pengendaliannya walaupun uangnya tidak disini tidak apa-apa tapi pengendaliannya.

Itu saja Pak Ketua jadi memang ini kita tidak bisa buru-buru ini Pak Ketua harus benar-benar pikiran kita tenang mungkin Pak ketua sholat tahajud dulu benar-benar baru boleh diputuskan terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Iskan Qolba dari PKS kami persilakan Pak Samsu Niang dari PDIP.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Komisi, Anggota Komisi, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya.

Saya ingin memulai dari awal karena sama tadi Pak Iskan saya ini belum duduk lama di Komisi VIII paham betul tentang proses-proses bantuan ini turun dari peralihan Pak SBY ke Pak Jokowi. Pada saat itu visi misi Pak Jokowi bagaimana mengentaskan kemiskinan ya dari 3.500.000 November 2019 menjadi 6.000.000 PKH pada saat itu tujuannya apa bagaimana percepatan pengentasan kemiskinan itu intinya disitu pengentasan kemiskinan.

Saya langsung saja, 2020 kemarin kita putuskan 2020 anggaran untuk kementerian sosial untuk PKH disepakati kalau saya tidak salah itu 9.000.000 lebih hampir 10.000.000 begitukan? 2020, sementara BPNT untuk 2019. 2021 kemarin itu 18.800.000 disepakati kemudian BST 9.000.000 kita harus melihat dari ini jadi BST bantuan sembako ya? Bantuan sembako PKH BPNT bantuan pangan non tunai dan BST bantuan sembako jadi 9.000.000 lebih 10.000.000 ditambah 18.800.000 tambah 9.000.000 itu ini harus dipahami tentang bantuan ini pada saat itu visi Kementerian Sosial, yang diadopsi oleh visi Jokowi bagaimana pengentasan kemiskinan 9.000.000 itu adalah PKH 18.800.000 itu juga PKH itu juga penerima BPNT maksudnya ada PKH ada non PKH menurut saya itu seperti itu ada PKH ada non PKH yang dimaksud adalah BPNT ini yang harus dipahami.

Maksudnya apa BST bantuan sembako untuk penerima bantuan sembako yang tercatat di data di DTKS itu dikunci oleh pemberi yang data dari DTKS jadi kalau ada dobel ya pasti ada dobel. Ada dobel orangnya karena itu juga BPNT itu juga bantuan sembako begitukan itu yang.

Nah kalau ada yang ditidurkan 21.000.000 orang artinya nanti akan dikurangi 21.000.000 berarti tidak ada lagi PKH tidak ada lagi BPNT padahal pemerintah ini mau mengentaskan kemiskinan ini. Kalau saya sih ini perlu betul-betul penjelasan yang akurat ini terhadap data ini karena coba bayangkan hanya kalau hanya data penerima karena PKH-nya 9.000.000 lebih BPNT 18.800.000 karena itu juga penerima BPKH itu juga penerima

BPNT beririsan. Ini saya tidak tahu mungkin Pak Pepen Pak Hari Hikmat yang paham ini, karena menurut saya seperti itu kemarin.

Nah kalau itu yang ditidurkan semua ini kalau menurut saya ini kalau itu yang tidak ada karena beririsan ini kalau itu yang tidak ada hancurlah kita ini. Hancur pengentasan kemiskinan, tiba-tiba tidak ada yang menerima BPNT, tidak ada penerima BPKH. Matilah kita dalam mengentaskan kemiskinan.

Makanya perlu ini data yang akurat ini perlu Pak Ketua ini jadi ini perlu ada sinergitas dalam rangka mengakumulasi data ini kalau ini tidak jelas. Kalau 21.000.000 bahaya itu karena 20.000.000 BPNT 18.000.000 BPNT itu juga BPNT itu juga BPNT iut juga PKH itu juga ini kalau itu dihilangkan mati visi misi pengentasan kemiskinan itu. Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Baik, masih ada oh ya Ibu Ketua Bu Anisah, silakan Bu Anisah Syakur.

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan beserta Komisi VIII

Ibu Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas waktunya saya tidak banyak, hanya pertama apa yang sudah dilakukan oleh Bu Menteri keseriusan di dalam menangani data ini. Saya berikan apresiasi. Namun demikian sama dengan teman-teman yang lain tentu penanganannya juga harus hati-hati bagaimana dengan kemudian orang-orang yang semula menerima akhirnya kemudian tidak menerima sama sekali.

Namun masalah data ini kita ketahui memang sangat amburadul sejak dulu sampai sekarang. Bahkan, kita kemarin ingin bagaimana agar orang yang mendapatkan BPKH misalnya orang yang bisa mampu itu bisa beralih kepada orang yang tidak mampu. Tapi nyatanya di daerah-daerah itu tetap saja mereka itu yang dapat walaupun sudah mampu tetap dapat yang tidak mampu itu banyak yang masih belum mendapatkan. Ini juga ditangani secara serius bagaimana verifikasi data ini supaya yang di daerah itu semacam ada apa ya *punishment* begitu karena apa karena kadang-kadang kepala desa dan RT juga tidak terlalu berani untuk merubah orang yang sudah mampu diberikan kepada yang tidak mampu itu kadang-kadang tidak berani karena ya sudah tetangga baik atau mungkin masih ada hubungan saudara.

Sehingga yang demikian-demikian itu apa yang kita harapkan tepat sasaran ternyata masih juga banyak yang tidak tepat sasaran karena itu kami

hanya menyarankan bagaimana penanganan masalah data ini supaya betul-betul secara serius. Karena kita tahu bahwa penanganan masalah data ini biayanya tidak sedikit tapi cukup besar untuk supaya dibentuk suatu tim atau bagaimana sistem yang sekiranya itu bisa menjadikan apa yang selama ini amburadul itu tertata dengan baik sehingga penanganan kemiskinan itu betul-betul dapat sampai ke mereka-mereka yang sangat membutuhkan.

Saya kira itu saja tambahan kami terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Bu Anisa Syakur masih ada yang lain dari fisik Bu Diah atau Bu Ina silakan Bu Ina.

F- PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat Pimpinan dan juga Anggota Komisi VIII serta Ibu Menteri beserta jajarannya.

Saya hanya ingin menambahkan saja tadi karena kalau umpama tadi validasi data itu sangat diperlukan di daerah. Contohnya kemarin tanggal 5 Mei itu seharusnya harus menerima BPNT dan program dari Kementerian Sosial sampai tanggal 28 itu tidak menerima.

Nah itu salah satunya adalah katanya data masih belum bisa didapat ini masing-masing kelompok disini. Memang kondisi per 30 April 2021 perbaikan data verifikasi dan validasi daerah pemadanan Dukcapil memang tadi ada angka yang keluar 21.867.613 data ditidurkan sedangkan ada data 14.413.307 dan usulan baru 7.427.109 perbaikan 670.927 usulan baru.

Nah dalam kaitan ini apa peran perguruan tinggi dalam konteks data terpadu kesejahteraan sosial ini yang membantu Kementerian Sosial dan perguruan tinggi mana saja yang akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial parameter kemiskinan sekarang apa saja mohon dijelaskan supaya tidak tumpang tindih dan informasi yang apa namanya yang tidak akurat yang didapatkan oleh verifikasi data ini. Oleh sebab itu saya mohon penjelasan supaya nanti kita di dapil masing-masing dapat menjelaskan kepada PKM penerima manfaat apabila mereka tidak tanggal yang disebutkan itu tidak menerima haknya Bu. Itu saja terima kasih.

Wabillahi taufiq Wal Hidayah.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ina Amania dari PDIP kita persilakan Pak Marwan Dasopang terahir.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati.
Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Bu Menteri rata-rata yang kita putuskan di sini penanganan sosial PKH itu rata-rata 10.000.000 KPM itu basisnya keluarga bukan orang basisnya keluarga ada yang 5 ada yang 4 ada yang 1 tergantung di keluarganya. Kemudian BPMT juga ada naik turun di 2019 itu 15,2 di 2020 naik menjadi 20.000.000 karena Pandemi di 2021 kementerian mengusulkan 18,8. Tapi kita tidak yakin akhirnya menjadi 18.500.000 keluarga.

Kemudian BST itu 2021 saya masih ingat itu *ngotot* saya dikurangi 350.000 lagi waktu itu tapi tidak berhasil akhirnya diputuskan 18,5 dari usulan 18,8 2021 ya. Kemudian BST di 2021 itu 9.000.000 tidak ada Jabodetabek hilang 4.000.000 itu yang kita putuskan kilas balik ini Bu Menteri data yang Ibu paparkan kemarin kita tidak bisa mendapatkan itu tetapi teman-teman inikan berkunjung ke Dapil menemukan seperti yang Ibu temukan.

Umpamanya yang paling terbuka ada masyarakat yang sebetulnya tidak pantas kita berikan PKH karena sudah rumahnya gedung punya kendaraan tapi masih menerima dan bahkan bolak-balik kita bicarakan disini pada akhirnya ada yang mengusulkan sudah kita cap saja rumahnya gedungnya itu kita cat rumah ini penerima bantuan PKH masyarakat berbeda-beda ada yang merasa berbangga sudah diusulkan dikeluarkan tapi tetap menerima. Saya ini tetap menerima biar mau dikeluarkan kira-kira begitu.

Ada juga orang yang mau keluar tapi tidak juga bisa keluar karena menurut dinas dari kabupaten sudah diusulkan tapi tetap keluar juga itu satu ciri, ciri lain kita menemukan pada saat pemberian itu sebetulnya tidak ada orangnya sudah meninggal tapi masih dikirim.

Kemudian ada yang sudah pindah dan lain-lain oleh karena itu kita tidak percaya Rp10.000 KPM ini datanya valid dengan baik akhirnya kita membentuk panja dan panja itu sudah ada hasilnya. Kira-kira hasil panja itu kita bersepakat pemerintah dan DPR bersepakat menjadikan Pusdatin satu-satunya panduan kita untuk data kemiskinan kita.

Yang kedua memperbaiki seluruh perangkat undang-undang dan peraturan menjadikan bahwa data ini akan gugur sendiri kalau parameternya tidak mencapai untuk kita bantu undang-undang harus kita cari seperti yang Ibu sampaikan itu jangan sampai sudah diusulkan Kabupaten tapi tidak muncul si penyalur jangan-jangan tidak menerima. Juga perubahan data kita berkeringat mengurus perubahan data Himbara-nya tetap kirim terus ini yang kita temukan.

Saya melihat rekomendasi hasil panja ini belum dilaksanakan maka sangat bergembira kami teman-teman disini Ibu menemukan tidak valid datanya 21.000.000 kenapa bergembira? Ternyata kita ini tidak ada lagi rakyat miskin kalau 21.000.000 basisnya keluarga paling tidak dikalikan 2 saja itu sudah 42.000.000 Bu. Sementara data kemiskinan kita menurut BPS hanya tinggal 32.000.000 lagi berarti tidak ada lagi data rakyat miskin kita ini *alhamdulillah* sudah sejahtera semua kita ini.

Tetapi saya heran dengan apa yang Ibu kerjakan Ibu melaporkan pada minggu lalu bahwa berhasil dan sudah disalurkan penyaluran April dan Mei di 2021 PKH sudah disalurkan di April 9.553.000 sementara di Mei sudah disalurkan 9.600.000 Ketua di Mei kemudian BPNT sudah disalurkan di April 13.900.000 sementara di Mei sudah disalurkan 17.88Juta BST sudah disalurkan 9.194.000

Pertanyaannya dimana 21.000.000 itu Kenapa Ibu masih menyalurkan kepada orang yang tidak valid. Saya ingin pakai istilah Ibu sekalipun itu saya tidak tahu dimana istilah itu dalam DTKS kita ditidurkan kenapa Ibu kasih makan orang tidur? Jangan dikasih makan Bu apalagi sudah ditidurkan kok dikasih makan? Begitu. Jadi kalau begitu data yang 21.000.000 itu sebetulnya siapa jangan-jangan Ibu urus orang lain karena urusan kita 10.000.000, 18.500.000, 9.000.000 urusan kita itu Bu.

Kalau Ibu urus umpamanya BPJS Kesehatan KIS KIP yaitu lain lagi tapi disini urusan kita berkisar 10.000.000, 18.500.000, 9.000.000 siapa itu 21.000.000? Saya belum menemukan karena data baru yang Ibu sampaikan disini hanya 26.000.000 disini tambahan karena itu pertanyaan ini akhirnya muncul.

Itu tadi sebetulnya Ibu temukan yang tidak valid 21.000.000. Itu sebetulnya dimana? Jangan-jangan Ibu mengurus orang lain bukan urusan Kementerian Sosial urusan kita hanya disini tapi kami berpegang kepada apa temuan Ibu karena Ibu sudah melaporkan ke KPK, melaporkan ke Kejagung dan melaporkan ke BPK. Maka karena itu kami merasa bahwa Ibu sudah menyalahi yang Ibu temukan karena Ibu masih salurkan juga.

Yang terakhir mengenai BPNT yang disebutkan dengan E-Warong Pak Ketua Komisi VIII pada saat pergeseran dari Raskin menuju BPNT sebetulnya tidak setuju dengan E-Warong Bu. Kalau mau kita jadikan tambahan lagi tidak mesti BPNT masukkan saja ke PKH komponennya-komponen kebutuhan pangan tetapi jawaban pemerintah pada saat itu bahwa pemerintah mewajibkan Kementerian Sosial untuk mencukupi kebutuhan nutrisi masyarakat. Maka uang yang disalurkan dari program BPNT ini harus dipastikan masyarakat membeli kebutuhan nutrisi mulai dari beras premium, daging, telur, buah-buahan dan sayuran. Lewat mana? Mereka dapatkan itu lewat E-Warong maka komponen nutrisi itu disebutkan Bu tiba-tiba Ibu menghapus E-Warong Ibu menyalahi itu keputusan itu.

Ini Pak Sekjen tidak memberi masukan ke Bu Menteri ini tidak jelaskan ke Ibu Menteri ini, Pak Hikmat dan Pepen tidak menjelaskan tidak memberi masukan tidak boleh sembarang Bu. Kami juga tidak setuju E-Warong kalau hanya uang yang dikirimkan ke orang miskin ngapain ada BPNT masukan saja ke PKH kok berbelit-belit semua

Kalau masuk Ibu hapuskan itu sampaikan dulu kesini karena berbuse-busa juga kita menyetujui itu hapus dulu itu peraturan mengenai kebutuhan nutrisi maka saya setuju dengan Pak Husni kemarin. Karena tidak mampu mengelola E-Warong rumah yang bagus ini Ibu membakar sendiri kan Ibu yang membentuk E-Warong itu untuk mencukupi nutrisi itu kalau uang yang kita kirim ke masyarakat belum tentu dia beli beras. Jangan-jangan beli gincu dia Bu. Karena itulah Komisi VIII kemarin tidak bisa menolak E-Warong dan bahkan dia setuju karena memang sangat mulia tujuannya tiba-tiba Ibu asal masuk trobos terus begitu. Itukan artinya Ibu tidak menghormati juga disini di Komisi VIII.

Menurut saya ini penting Pak Ketua bahkan mungkin kita perlu membentuk Panja juga Ketua mengenai 21.000.000 kalau tidak kita inikan seolah-olah bagaimana ini kita masih berbuse-busa mengurus anggaran tapi 21.000.000 sudah tidak ada kami percaya 21.000.000 tidak ada dan kami akan kejar kalau tidak Ibu harus mohon maaf ini kepada masyarakat bahwa 21.000.000 itu bukan urusan PKH urusan-urusan lain kita inikan dipermalukan kita Bu menyetujui urusan 10.000.000 PKH 18.500.000 BPNT 9.000.000 BST sudah tidak valid 21.000.000. Tapi kita masih salurkan itu memermalukan namanya.

Nah karena itu jadi berakibat Bapak Ketua 2022 berat rasanya memahami anggaran Kementerian Sosial bila tidak selesai 21.000.000 siapa dimana ditidurkan dimana istilah nomenklaturnya ditidurkan ini pun tidak bisa seperti itu. Nanti orang salah memahami kalau dosis alat menidurkannya habis tiba-tiba dia bangun bagaimana.

Ini penting karena ada sisi hukum atau kebijakan politiknya yang akan berakibat nanti karena menyalurkan anggaran kepada 21.000.000 sesungguhnya tidak ada. Kalau kita membaca saya belum baca pendahuluan RAPBN 2020 saya belum baca kalau ternyata nanti masih menyasar PKH sebegitu besarnya maka sebetulnya Ibu tidak paham apa yang Ibu sampaikan kemarin itu. Kami kira itu Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik saya kira cukup ya intinya begini Bu Menteri yang kami hormati dan kami banggakan kita ingin sepakat Bu kita rapikan data Bu. Tapi yang menjadi pertanyaan masyarakat itu tadi 21.000.000 ini bagaimana cara mengambilnya itu Bu per kabupaten/kotanya bagaimana? Itukan terus selama ini uangnya habis terus Bu ini di Himbara-nya ada masalah atau ada yang bermain menyalurkannya atau bagaimana? Misalnya kata Ibu nama Yuni banyak sekali tapi Yuni ini terima semua Bu iya kan? Uangnya habis dan tidak kembali ke Kementerian Sosial ini yang mau kita usut sebenarnya Bu dan DPR tidak mau dikatakan kong kalingkong Bu kita tidak ada sama sekali tidak dan tidak paham begitu Bu.

Kemudian tadi yang kata Pak Marwan yang tahun berjalan terus saja Kementerian Sosial salurkan bahkan melebihi kata Pak Iskan tadi melebihi data yang tersaji. Coba Bu konstruksi supaya kita sama-sama paham saja Bu ini ambil datanya gimana dari kabupaten mana sehingga nanti kita ini kalau

membahas anggaran tadi berpijak saya yakin Bu Menteri juga ingin ini tidak ada masalah apa lagi kami Bu ya karena persetujuan anggaran disini kan. Kalau kami menyetujui sesuatu yang belum jelas nanti ramai lagi Republik ini Bu mungkin itu landasannya Bu sehingga kita teruskan pembahasan ini secara serius supaya nanti ketika kita membahas anggaran itu pola pikir kita sudah sama. Untuk itu kami persilakan Bu Menteri untuk menjawab silakan Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang terhormat Ketua Komisi VIII DPR RI
Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yang terhormat Anggota Komisi VIII DPR RI hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat Sore
Shalom
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan.

Mengawali pertemuan ini pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian Pimpinan Sidang dan Bapak Ibu sekalian Anggota Dewan yang terhormat.

Saya sudah mencetak 21.000.000 ganda bisa dilihat per-daerah saat ini saya membawa ada 25 kontainer yang sudah kontainer box 1 meter kali 1 meter yang sudah kami cetak. Kemudian yang 15-10 masih dalam proses jadi *monggo* kalau mau *dipirsani* jadi yang jelas seperti tadi yang saya kemarin saya sampaikan. Jadi data awal itu di DTKS ada 100.000.000 lebih data awal 190.000.000 di DTKS kami tidak berubah sama sekali saya hanya melihat data di DTKS karena apa karena ditemukanlah oleh BPKP.

Jadi kalau kami ke tempat tersebut itu adalah konsultasi terhadap temuan BPKB yang ditemukan karena sempat mohon maaf Pak saya juga dimarahi oleh BPKB saya juga dimarahi oleh KPK karena dikira saya tidak mengerti. Karena memang saya tidak mengerti saat masuk setelah itu jadi rekapannya itu adalah temuannya di BPKB terdapat 3.800.000 sekian data NIK dan KPM penerima Bansos yang tidak valid ini temuan BPKP.

Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK sama ini temuan BPKP. Temuan BPK terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.900.000 sekian nomor KK tidak valid sebanyak 16.000.000 nanti kami

akan serahkan Pak presentasi saya ini adalah *summary* dari BPK, BPKP dan KPK

KETUA RAPAT:

Bentar Bu itu BPKP BPK itu bahannya itu penerima manfaat atau data keseluruhan tadi Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Mereka forensik Pak setahu saya mereka forensik. Jadi mereka kalau yang 2020, mohon maaf saya tahu saya tahu pemeriksaan BPK karena yang sebelumnya saya tidak mengerti Pak saya tidak tahu ini adalah temuan 2020.

Nah mereka forensik Pak setiap pencairan itu mereka forensik mereka punya ahli ID dan inilah yang sekarang saya kerjakan. Jadi mereka forensik penerima ini kemudian dikaitkan dengan data kependudukan dikaitkan dengan data NIK akhirnya ketemulah seperti yang saya temukan persis. Jadi ini data mereka temukan setiap tahun sedangkan saya forensik yang 100 berapa ya datanya.

KETUA RAPAT:

Artinya setiap tahun mereka mendapat bantuan Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Sekarang kita tidurkan data ini berarti tadi kata Pak Marwan nanti yang terima siapa kalau kita tidurkan.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Bukan Pak data tadi datanya DTKS itu 190.000.000 Pak jadi bukan data DTKS tolong yang.

KETUA RAPAT:

Ini kita dialog saja biar enak Bu ya? Silakan kalau Anggota.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Begini Bu, kita sebetulnya senang karena kita juga bertanya tentang itu orang. Kita temukan di lapangan yang kita pertanyakan Ibu sudah tidurkan 21.000.000 kita tidak tahu 21.000.000 itu data mana yang kita urus Bu karena anggarannya kita setuju 10.000.000. Data PKH 18.500.000, BPNT 9.000.000 BST tapi Ibu masih salurkan ini April Mei masih Ibu salurkan.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Nanti saya jelaskan saya belum selesai Pak. Saya belum selesai menjelaskan jadi data DTKS awal kondisinya seperti ini Pak. Jadi data kondisi awal itu 190.000.000 di DTKS. Nah kemudian data BPNT di dalam DTKS yang 193.000.000 itu ada 19.000.000 penerima BPNT ada penerima BST 10.600.000 sekian ini data awal. Kemudian ada PKH itu 56.812.000 sekian. Ini pengurus kalau PKH kemudian disitu saya gabungkan disitu kemarin saya sudah sampaikan jadi kenapa Pak kenapa daerah mengusulkan daerah mengusulkan itu ada 4 pulau di Kementerian Sosial 4 pulau data. Jadi ada data DTKS ada data BPNT ada data PKH ada data BST sendiri-sendiri datanya.

Nah yang diterima usulan dari daerah itu ke DTKS tidak konek dengan 3 pulau tadi BPNT PKH dan BST kemudian saya masuk saya jadikan satu karena tadi sepakat dengan Bapak bahwa 1 data DTKS kemudian kita gabung kemudian setelah itu kita padankan dengan NIK Dukcapil dari situlah ketemu Bapak dari situlah ketemu kami.

Jadi yang dapat diterima sekarang yang *new* DTKS itu masih yang kita forensik karena tidak padan jadi ada yang NIK-nya itu 00000 ada yang NIK-nya 9999 ada yang.

KETUA RAPAT:

Boleh saya tanyakan Bu, itu terima Bu tidak terima bantuan?

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Tidak, nanti saya pilah disini Pak sebentar saya pilah.

KETUA RAPAT:

Begini Pak Samsu Niang begini kata Bu Risma ini inikan ditegur terus Kementerian Sosial dari BPKP, KPK sama apa tadi satu lagi Kejaksaan karena selalu ada temuan banyak NIK-nya sama namanya sama begitu.

Maka yang mau kita kejar ini Ibu tertibkan ini penerima bansos penerima manfaat atau diluar atau DTKS-nya itu yang mau diterapkan begitu lho.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

DTKS pertama Pak karena kita harus tertibkan data DTKS dulu kemudian setelah data DTKS ketemulah ini Pak ada karena tidak ada setelah kita gabung.

KETUA RAPAT:

Atau begini Bu pertanyaan sederhana saya Bu inikan ada penerima 18.500.000 BPNT, 10.000.000 PKH, 9.000.000 BST totalnya kan 37.500.000 penerima tahun 2021. Kalau kita sederhananya kita kurangi 21.000.000 kalau kita sederhananya kita kurangi 21.000.000 sebenarnya yang bersih itu cuma 16.000.000 Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Bukan seperti itu Pak saya belum jelaskan tadi Pak saya belum selesai menjelaskannya *nyuwun sewu* belum saya belum selesai. Nah kemudian setelah ini kita masukan begini Pak 4 data ketemulah data yang tidak jelas NIK alamat NIK-nya 000 itu kita hapus karena tidak ada nama tidak ada begitu.

Nah Indonesia tinggallah selisih 155.000.000 kemudian kita masuk ke new DTKS ke new DTKS itu yang saya buat SK-nya 138.425.000 itu yang sudah padan Dukcapil. Nah kemudian kita masuklah ke data yang sudah salur tolong data salurnya tolong data salur data salur itu ini Pak 52.000.000 ini yang salur yang sudah menerima bantuan ini udah *clear* Pak. Sudah *clear* dengan data jadi tadi 150.000.000 kita koreksi NIK-nya tinggal 155.000.000. Kemudian kita koreksi lagi karena Pak kita sesuai dengan apa permintaan dari Bappenas kita harus membuat 160.000.000 data. Saya tidak berani nahan Pak karena ini yang 128.000.000 itu sudah pada NIK. Kemudian dari situ 138.000.000 ini kita masuk ke yang salur tinggallah yang 52.000.000 ini itulah yang terdiri dari 18.000.000 BPNT. Kemudian PKH kemudian 10.000.000 BST itu Pak.

KETUA RAPAT:

Ini kalau saya mungkin sederhana saya Bu pertanyaannya saya oke itu kita paham Bu. Artinya Ibu membersihkan data dari keseluruhan global data akhirnya ketemu yang bersihnya itu 52.000.000 sekian.

Nah pertanyaan yang di publik itu begini Bu dinarasikan 21.000.000 penerima manfaat seolah-olah selama ini terima semua. Yang pertanyaan saya begini Bu dari 21.000.000 itu berapa banyak selama ini diterima Bu?

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Jadi begini Pak. Jadi ada yang 1 orang itu kemarin saya tunjukkan Selamat itu 539 NIK sama nama sama itu kita ambil satu Selamat saja sekarang ini yang kita bersihkan ini yang 37 itu kita tidurkan kenapa saya istilahnya tidurkan itu karena kalau dihapus tadi sesuai saran Bapak saya khawatir nanti kalau *software* ini tidak mencakup tiba-tiba kemudian keluar tanpa kita bisa kontrol. Tapi kalau ditidurkan untuk membangunkan itu ada SOP-nya namanya kalau di kalau di IT Itu Pak ada namanya proses-proses dimana kalau ada membuka data ini ada harus melewati mekanisme tertentu di IT seperti itu.

Jadi kenapa kemudian sekali lagi Pak ini yang dobel tadi ada yang Nurhayati ini contohnya siapa ya itu ada 25 kontainer.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Bu, ini tidak kita mendukung ini bahwa dobel-dobel ini kita mendukung dibersihkan tapi begini Bu kita ini salah paham masyarakat juga salah paham karena yang kita urus sesungguhnya 10.000.000 keluarga PKH 18.5 BPNT tapi sebetulnya penerima BPNT itu penerima PKH. Artinya hanya tambahannya 8.500.000 sebetulnya jadi 18.500.000 ditambah 9.000.000 artinya itu hanya 26.000.000 kalau Ibu ketemukan 21.000.000 maka.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Bukan Pak di luar itu.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Orang tidak tahu kita tidak tahu disini.

KETUA RAPAT:

Begini Bu, karena ini ada akibatnya dengan anggaran 2022 Bu. Jadi yang saya kejar itu sebenarnya berapa orang yang dobel berapa banyak yang dobel terima atau yang berapa banyak yang NIK-nya tidak benar yang terima Bu. Kalau yang 138.000.000 itu Ibu bersihkan bagus.

Tapi yang selama ini dikasih setiap tahun ya kan ternyata ini tidak tepat sasaran itu lo namanya dobel NIK-nya dobel tapi disalurkan. Terus itu berapa banyak dan itu artinya berakibat dengan anggaran kecuali kalau datanya

sudah bersih kita alihkan ke yang berhak menerima. Tapi kita mau tahu dulu berapa ini kerugian negara ini Bu iya kan kalau mau jujur ini Bu.

Kan tadi kata Ibu ada nama Yuni NIK-nya banyak kok habis duitnya ini Himbara yang bermain atau siapa yang bermain atau siapa yang bermain di lapangannya kan begitu pola pikir kami Bu karena dianggap anggaran habis ternyata ini bermasalah data dan itu banyak 21.000.000. Silakan Pak.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Ini artinya begini ini kesalahan persepsi.

KETUA RAPAT:

Ini belum dipersilakan ngomong bentar dulu Kyai Maman dulu habis itu Pak Marwan biar tambah lengkap.

F- PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Terima kasih.

Pimpinan dan Bu Menteri beserta jajaran.

Jadi mengelola negara itu Bu bukan sekedar niat baik Bu. Tidak cukup niat baik niat baik Ibu itu kita dukung. Tapi sekali lagi menuju *good governance* itu tidak sekedar niat baik ada kepatuhan kita kepada konstitusi yang melahirkan regulasi ada juga *managerial* yang bagus.

Yang pertama, kita harus setuju dulu bahwa ada rapat di mana DPR menyetujui ada kesepakatan disana soal 34.000.000 keluarga lalu ada data yang dilaporkan oleh Kementerian Sosial sendiri kepada DPR RI. Nah dari yang disepakati dan dilaporkan itu menimbulkan pertanyaan bagi kami sebenarnya dalam bahasa Pak Marwan itu kita lagi *ngurus* data yang ini nih yang sudah disepakati yang dan Ibu laporkan niat Ibu untuk membereskan data ini di Komisi VIII sudah ada Bu Panjanya tentang verifikasi data begitu. Makanya data DTKS yang ditidurkan tersebut kenapa itu pertanyaannya kenapa tidak berpengaruh terhadap penyaluran yang telah dilakukan selama 2 bulan terakhir. Maka pertanyaannya yang pertama data DTKS yang ditidurkan tersebut dari data yang mana tidak perlu dari data DTKS yang keseluruhan kita ngomong yang disepakati oleh DPR dan yang dilaporkan itu?

Yang kedua, kenapa data yang telah ditidurkan tersebut tidak mengurangi realisasi penyaluran bantuan karena kami menerima bantuan juga dari Ibu tentang yang dilaporkan Pak Marwan tadi sudah detail itu malah ada kelebihan yang 9,2 itu kalau ada kelebihannya darimana itu duitnya kok kita tidak tahu DPR RI seperti itu.

Keempat seluruh pergeseran anggaran realisasi dan sebagainya itu mau tidak mau sesuai amanat MD3 itu harus sepengetahuan DPR RI. Jadi

sekali lagi Bu yang kita persoalkan bukan soal Ibu membersihkan membereskan dan sebagainya yang kita pertanyakan itu saja bahwa apa yang telah disetujui dengan DPR dan apa yang dilaporkan Kemensos kepada DPR itu harus sinkron dengan laporan keluar publik soal yang 21.000.000 data yang ditidurkan itu?

Jadi kami tidak mengurus yang ratusan dan lain sebagainya yang kita pikirkan bagaimana yang kita setuju itu efektif dan membuat apa yang Ibu niatkan itu menjadi (suara tidak jelas) bahwa niat tidak sekedar niat tapi diimplementasikan dengan *good governance* yang transparan akuntabel dan juga melapor kepada DPR RI itu saja Bu yang kita inginkan.

KETUA RAPAT:

Bentar Bu. Ya Pak Marwan?

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Bu kita ini tidak usah bicara hal-hal lain kembali lagi yang disampaikan Kyai Maman ya yang kita sepakati ini saja. Jadi kalau kasihan teman-teman yang di Kementerian Sosial ini seolah-olah ya menyetujui atau data-data palsu. Jadi kira-kira di 2020 kita sudah menemukan yang tidak bisa disalurkan oleh Himbara BPNT itu maka dikurangnya dari 17.500.000 menjadi 15.200.000 itu di 2020 karena ada temuan BPK kesepakatan kita disini dikurangi karena ada Rp32.000.000.000,- lupa saya angkanya itu mengendap di Himbara karena tidak tersalurkan. Akhirnya itung-itungan saya disini sudah kalau begitu BPNT berkurang menjadi 15.200.000 keluarga. Tapi itu dulu demi menjadi kembali lagi 20.000.000 seperti itu bisa dihitung Bu kesepakatan kita 17 menjadi 15 itu ada angkanya dari kesepakatan ini Ibu mengurus yang lain seolah-olah teman-teman di Kemensos dan DPR ini menyetujui yang fiktif padahal Ibu bicara lain DTKS

Kalau Ibu bicara tadi sebetulnya mengenai DTKS Ibu harus lengkap menyampaikannya kan belum berubah peraturannya DTKS itu ada desil 1, desil 2, desil 3 di desil itu mana yang menerima bantuan sosial yang menerima inilah yang dilaporkan perbaikan data yang disana yang tidak berakibat ke anggaran kenapa Ibu bercuap-cuap seolah-oleh Ibu sudah menyelamatkan anggaran padahal tidak Ibu masih salurkan saja ini?

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Saya mungkin bisa jelaskan Pak. Terus terang data ini banyak sekali tekanan kami saya harus jelaskan. Jadi kenapa kemudian saya keluarkan ini sebetulnya bukan Insya Allah tidak ada yang data salur tetep kami amankan salur. Tapi bahwa data dobel atau ganda yang dia memang ganda jelas itu datanya kita tapi induknya. Jadi kayak Selamat itu sudah kita cek Selamat itu dapat 39 dengan NIK yang sama. Namun dia sendiri malah tidak terima seperti itu.

Jadi kemudian karena sekali-sekali lagi banyak Pak saya harus sampaikan saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua jadi kemudian akhirnya saya kemudian beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus. Karena nyuwun sewu Pak sekali lagi banyak sekali yang seperti itu jadi kenapa kemudian saya beranikan sendiri yang dobel memang kita kemudian hapus dan kemudian kita *launching*. Jadi tidak ada niatan saya melaporkan atau apapun tidak ada tapi bahwa saya kepingin bahwa data ini harus saya amankan karena bukan tidak mungkin Pak dan ini sudah saya laporkan di Bapak Presiden.

KETUA RAPAT:

Yang menekan Ibu itu siapa.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Ada Pak mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Bu kita ini termasuk yang tertuduh Bu DPR ini menyetujui.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Saya mohon maaf kalau itu saya mohon maaf kalau memang itu.

KETUA RAPAT:

Bukan oleh publik kita ini seolah menyetujui data fiktif tapi dananya disalurkan Bu Triliunan Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Saya akan klarifikasi bukan itu sebetulnya saya tidak pernah ngomong begitu saya demi Allah tidak pernah ngomong begitu.

F- PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Ketua, Bu Menteri mohon maaf Bu Risma harus yakin bahwa kami ini sangat mencintai Ibu *we love you full* Bu garis bawah saya sebagai mantan direktur relawan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin tahu persis betapa kemiskinan di depan mata kita belum diselesaikan. Tapi dengan cara yang baik sesuai konstitusi sesuai regulasi saya tahu Bu yang menekan Ibu

siapa saya tahu kemana arah data ini duit mengalir dan sebagainya dan itu tidak penting banget. Buat kami karena di Komisi VIII kami sudah tidak ada kubu-kubuan yang ada adalah bagaimana kemiskinan ini diselesaikan.

Maka menurut saya ini sekedarnya nasehat saking cintanya kami kepada Ibu tolong bekerja itu berdasarkan konsultasi semua musyawarah sehingga akan dua saja Bu. Mana data yang disepakati oleh DPR disetujui oleh DPR mana data yang Ibu telah sampaikan itu saja tinggal dijelaskan soal nanti kita ingin membongkar bagaimana soal data ini menjadi sangat sulit itu tidak usah disini Bu. Kita tidak usah ngobrol di ruang-ruang ilmiah kita bisa ngomong dan lain sebagainya Ibu sebagai Menteri Sosial ngurus saja yang sekarang kita sepakati di DPR. Kita selesaikan kalau ini kita berhasil maka kita bisa menaikkan kembali target-target kita sehingga dengan kesimpulan Ibu seperti ini bahaya Bu Komisi VIII bisa untuk tidak memberikan anggaran paling tidak hilang Rp21.000.000.000 akibat data ini dan itu saya kira sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita karena Komisi VIII menganggap bahwa Kementerian Sosial adalah garda terdepan. Lalu ingin mengatakan inilah wujud bagaimana kita ingin mewujudkan cita-cita *the founding fathers* kita.

Makanya Ketua Komisi selalu memberikan ini soal sederhana satu soal komunikasi soal kita komunikasi soal regulasi itu saja yang ingin dipatuti jangan sesuatu yang belum melambung untuk dalam bahasa fikih itu Bu *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* sesuatu yang tidak bisa dijangkau Bu. Jangan lalu membiarkan yang sesuatu yang hari ini sudah kita lakukan begitu saja Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Jadi begini Pak ya saya sampaikan jadi saat kita menggabung 3 data itu Pak disitulah kelihatan disitulah 4 pulau data jadi ada DTKS PKH. Kemudian BPNT kami sepakat bahwa BPNT per BPNT PKH. Bahkan kemarin saya secara eksplisit melaporkan kepada Pak Presiden Pak yang PKH yang menerima Rp900.000,- apakah masih dapat BPNT iya Bu tetap saya gandengkan jadi mungkin Pak kita akan bicara detail mungkin bukan disini memang saya akan tunjukkan bagaimana detail.

KETUA RAPAT:

Begini Bu ini tadikan tadi kita pernah mengurangi anggaran Bu dari apa namanya 17 menjadi 15 Bu jadi makanya tadi saya tanya dari 21.000.000 itu berapa yang benar-benar bermasalah yang benar-benar sudah diberikan Bu tidak semuanya terimakan karena Ibu global 21.000.000 dari 21.000.000 itu yang terima berapa Bu bermasalah apa 1.000.000 apa 2.000.000 begitu

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Jadi Pak kemarin kita forensik kami rutin rapat saya terus terang juga takut Pak melihat data ini kita rutin rapat bulanan rapat bulanan dengan BKP KPK tiap bulan karena kita meminta masukan yang meninggal dan lain sebagainya.

Tapi bahwa sebetulnya mereka terima semua hanya yang ganda saja yang kita hapus. Makanya kami kami punya ruang Pak ruang untuk usulan baru karena kemudian yang ganda itu kita hapus. Nah sehingga tapi nama misalnya Nurhayati mereka tetap terima hanya misalkan 6 itu yang kita hapus.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Pak Ketua sederhana saja dari 21.000.000 ini supaya *clear* ya 21.000.000 ini berapa yang berada penerima PKH yang 10.000.000 dari 21.000.000 ini berapa yang ada di BPNT dari 21.000.000, berapa yang ada di BST supaya gampang kita kalau urusan memperbaiki data. Jangan dicampur aduk dengan anggaran yang disetujui. Inikan orang seolah-olah menganggap dari yang kita setuju ini 21.000.000 tidak valid bermasalah sementara Ibu salurkan terus.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Iya kita lihat Pak datanya tolong dikeluarkan.

KETUA RAPAT:

Disalurkan saja jadi misalkan BPNT itu berapa yang bermasalah begitu PKH 10.000.000 itu berapa yang bermasalah Bu irisannya bagaimana kan ketahuan ini.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Pak Ketua kita jangan menyebutkan sudah bermasalah selama belum diverifikasi oleh kementerian tidak berhak hati-hati Pak.

KETUA RAPAT:

Inikan versi Bu Menteri makanya kita kejar dulu.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Tidak tiba-tiba nanti ada data itu cuma karena kebobrokan data di Kementerian Sosial yang seharusnya dapat dia tidak dapat dia protes tiba-tiba pendatang baru dikasih ke dia. Ini politik Pak Ketua jangan main-main masalah data ini.

KETUA RAPAT:

Kita kejar dulu Pak Iskan ini yang penerima yang 10.000.000 PKH.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Ini baru dugaan kita ngomong verifikasi begitu.

KETUA RAPAT:

Iya lho kan bilang masalah ditidurkan sudah ditidurkan oleh Bu Menteri makanya kita kejar dulu yang ditidurkan dari BPK itu berapa.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Saya tidak setuju itu ditidurkan sebelum diverifikasi itu tugas Kementerian Sosial.

KETUA RAPAT:

Inikan versi Bu Menteri belum disetujui memang.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Saya akan arahkan semua Anggota yang itu untuk melakukan di pengadilan di Dapil saya sudah banyak yang lapor saya kenapa begini Pak saya orang miskin ketemu dengan saya jadi tidak gampang hanya menidurkan data harus diverifikasi ke orangnya.

KETUA RAPAT:

Makanya kita tanya dengan Bu Menteri parameternya apa basisnya apa per kabupaten kota bagaimana begitu lho ini mesti?

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Sudah banyak di dapil kita mengadu tiba-tiba tidak dapat itu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Baik, Pak jadi ini data.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Jadi maaf Bu ini baru dugaan jangan Ibu seenaknya saja Ibu menyetop data itu orang yang miskin jadi tidak makan.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Tidak Pak tidak seperti itu Pak.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Kan ditidurkan kalau sudah ditidurkan.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Bukan jadi itu yang ganda Pak kalau namanya sama kemudian NIK-nya sama kita kasih sampai 39 itu ya tidak benar Pak.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Ini 39 ini kecil Bu ini datanya 21.000.000 ini makanya nanti kami tunjukkan saya bisa bawa data.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Iya makanya nanti saya tunjukkan saya bisa data

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Saya itu saja Bu tugaskan Kementerian Sosial verifikasi data baru itu beres.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Iya Pak yang ini Pak yang 2.000.000 sekian itu sudah cair kemudian 3.000.000 sekian sudah cair kemudian 260.000 sekian itu sudah cair itu yang akan kita diverifikasi oleh BPKB, kemudian BPK dan KPK dan Kejaksaan agung ini yang akan diverifikasi.

Jadi Pak sekali lagi kenapa saya melakukan ini saya berharap Pak. Saya mohon maaf sekali saya di Surabaya menyelamatkan Rp15.000.000.000.000,- tidak ada satu pun yang kena kenapa bagi saya kalau itu bisa diselamatkan namanya pencegahan Pak dan saya masuk disitu kenapa saya juga tidak ingin teman-teman saya ada masalah.

Kemarin sudah saya sampaikan begitu jadi. Karena itu kenapa kemudian di awal ini saya sampaikan begitu nanti kalau misalkan kami yang harus melakukan tidak apa-apa cuma tidak *fair* lagi nanti kami dijawab.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Dengan ini Pak ketua dengan penjelasan Bu Menteri ini menunjukkan bahwa data 21.000.000 itu berada di kesepakatan kita itu kan bermasalah katanya berarti 21.000.000 berada di 10.000.000 PKH 18.800.000 BPNT 9.000.000 penerima manfaat semua karena bermasalah karena itu dimana letaknya.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Jadi begitu Pak ini nanti ada tidak profilnya yang ini saya nanti bisa tunjukkan.

F- PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Bu Menteri mohon fokus kepada PKH yang 10.000.000 BPNT yang 20.000.000 BST Jabotabek itu 9.000.000 itu saja.

KETUA RAPAT:

Yang bermasalah itu berapa Bu supaya nanti kita di anggaran 2022 itu enak Bu kita mau tetap mau kurang atau tambah begitu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Jadi begini Pak yang BPNT itu 2.000.000 sekian kemudian itu sudah transaksi kemudian yang PKH ini 3.000.000 sekian ini sudah transaksi kemudian yang BST itu 262.000.000 sekian itu yang sudah transaksi.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Interupsi Pak Ketua, bagaimana kalau rapat ini di skors dulu supaya ada titik temu atau ditutup atau dilanjutkan. Bagaimana? Di skors dulu supaya ada komunikasi dulu karena kalau seperti ini tidak ada titik temu begitu. Jadi olehnya itu supaya ada sinergitas antar Kementerian Sosial dengan Komisi VIII barangkali.

KETUA RAPAT:

Tawaran saya begini karena ini masuk siklus anggaran ya kita dengarkan dulu pengantar anggaran tapi tidak kita bahas kita dengarkan saja Pak itu akan kita bahas setelah data ini *clear* bagaimana.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Begini Ketua kita melihat Kementerian Sosial itu adalah Tim Ibu ini punya Eselon I, Eselon II, Eselon III kita ingin maaf Bu ya Ibu kan pastilah dia belajar cepat disini tapi tidak mungkin keputusan semua dijawab oleh Ibu Menteri.

Jadi kita berharap di Kementerian Sosial ini kita mendapatkan solidaritas ini maaf Bu bukan menginikan Ibu. Kadi menurut saya tolonglah Eselon I itu dibantu permintaan data ini jadi tanpa menginikan Ibu Menteri tapi kita ingin kalau tujuan Ibu nanti ingin memperbaiki data itu *ahlan wa sahlán*/silakan dan selama ini memang sudah kita ributkan Bu. Tapi yang kita fokus di ini tadi segala sesuatu Rp1,- uang negara tidak boleh salah sasaran itu prinsip keadilan kalau itu akan bantu Ibu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Itulah demi Allah demi tuhan itulah saya melakukan ini Pak karena kalau diteruskan ya tambah parah Pak kondisinya karena itulah kemudian saya melakukan ini.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Kalau Ibu bilang umpamanya 10 katakanlah Rp5.000.000,- ini bermasalah ini langsung pengaruhnya sama anggaran Bu kita akan kurangi anggaran kalau kita tidak percaya data Ibu kita tidak akan selesaikan anggaran kan yang rugi. Saya juga maka tolong Ibu mungkin Eselon I bantuan kita yang mana yang benar itu begitu.

Kalau tujuan Ibu untuk memperbaiki data itu mungkin butuh waktu Bu ya silakan kalau perlu anggaran kita siapkan selama ini juga kita kasih

Rp800.000.000.000,- untuk bangun DTKS tapi ternyata berantakan juga datanya kita bingung juga melihat Kementerian Sosial ini.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Jadi begini Pak itu di temuan KPK itu dari anggaran itu itu disampaikan akan terjadi kerugian negara sebesar Rp500.000.000.000,- karena di daerah itu hanya per orang itu berapa per KK. Jadi kenapa jadi mohon maaf Pak memang meng-*clearkan* tadi Pak Ketua menyampaikan saya memang harus cek semua Pak laporan BPK karena kalau tidak ini terus setiap tahun begitu terus keluar.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Begini Bu kita menghormati BPK ya kita hanya ingin begitu BPK mengatakan ini data kami ini yang diperjuangkan Ibu harus memperjuangkan konstitusi Kementerian Sosial walaupun Ibu baru dilantik sekian bulan ini institusi. Jadi yang kita inginkan jangan sampai seolah-olah BPK bilang itukan temuan Bu belum tentu benar. Kita ngerti hukum temuan KPK itu harus ditindak lanjuti oke, bahwa data Ibu harus kita perbaikan tidak kita harus memastikan kita buat kesepakatan disini. Data ini kita sampai akhir tahun kita lakukan verifikasi nah kalau cuma kita verifikasi berarti data Ibu yang lama ini masih kita pakai anggaran akan turun sama Ibu. Karena kalau sudah kita sepakati data bermasalah otomatis Pak Ketua itu turun Rp15.000.000.000.000,- apa Ibu tidak begitu Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Jadi begini Pak jadi begini maksud saya kalau data ini benar kemudian ada kita menampung usulan baru dari daerah yang tadi Bapak sampaikan sambil kita verivali di lapangan yang tidak berhak ya tidak boleh berhak kenapa? Kemudian kami kerja sama dengan perguruan tinggi tapi yang berhak dia wajib untuk dapat begitu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Itukan baru dugaan di DPR itu tidak bisa menerima dugaan Bu harus *real* Kementerian Sosial selalu mengatakan *by name by address* saya cek itu data PKH di kabupaten Mandailing Natal itu tidak ada desanya Cuma dibidang desa Simanuak itu bukan *by name by address by address* itu RT RW minimal namanya. Jadi mohon maaf Bu ya.

Jadi begini yang itu yang tadi saya jawab jadi awalnya Pak itu ada 3.000.000 sekian yang Himbara tidak mau mencairkan karena namanya cuma IT tidak ada dusunnya tidak ada alamatnya kemudian namanya ada NA70 itu kemarin sudah kita rapatkan akhirnya Himbara mau tinggal sekarang.

KETUA RAPAT:

Tidak mau mencairkan itu duitnya dimana sekarang Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Ada di mereka jadi begini Pak ini ada cash-nya yang mereka memang tidak mau mencairkan setelah saya rapatkan ternyata cash-nya ada seperti itu padahal kita cek di data kependudukan memang namanya cuma 2 huruf Himbara minta 3 huruf. Kemudian tidak boleh nama itu sistem iru begitu nama itu tidak boleh NA70 ada angkanya tapi kenyataannya itu namanya NA70. Kemudian nama dusun itu tidak ada alamat lengkap itu tidak mau nah kemudian kita rapatkan ada yang memang duit itu sudah dikembalikan nah kemudian ada yang kita ganti baru.

Nah tadi soal data Pak ada Pak kami juga gimana kalau saya teruskan nanti saya melanggar jadi ada pemutakhiran tahun.

KETUA RAPAT:

Begini solusinya sekali lagi tadi saya bilang tadi Ibu sampaikan dulu usulan anggaran tapi hanya menyampaikan kemudian nanti kita buat rapat tertutup yang data ini.

F- PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Ketua, sebenarnya ini simpel saja Pak Ketua jadi pembahasan kita itu Ibu pertama ada persetujuan DPR RI dengan Kementerian Sosial ada 34.000.000 keluarga. Lalu Ibu Kementerian Sosial melaporkan ada 36.600.000 yang sudah mendapat penyaluran itu saja sudah selesai itu. Artinya Kementerian Sosial sudah melakukan kinerja yang baik walaupun kami perlu bertanya juga itu ada kelebihan data yang sebanyak itu.

Yang pertama Bu, supaya pembicaraan kita untuk anggaran ke depan itu Ibu dapat mungkin justru akan ditambah karena apa satu Ibu mengkritisi soal verifikasi data yang dananya terlalu banyak dan sebagainya itu kita hargai kita hormati. Jadi kita akan lebih simpel kesana dan saya rasa soal niat tekad Ibu yang begitu besar soal data yang begitu banyak itu saya rasa jangan dibahas pada kesempatan ini.

Tetapi saya mohon Bu komunikasi dengan DPR dan komunikasi dengan internal Kementerian Sosial baik itu Eselon I Eselon II itu menjadi sangat penting karena bagaimanapun saya melihat teman-teman di tingkat Eselon I sudah melakukan reformasi birokrasi yang kuat bagus Ibu sebagai *leader manager* yang baik. Itupun harus mendapatkan *suply* data termasuk mana yang tepat disampaikan di forum DPR ini kita lagi ngomong anggaran Bu ngomong anggaran sehingga kalau hasil laporan ini sebagainya tentu

Komisi VIII akan menyetujui anggaran yang diajukan itu saja sebetulnya simpel banget Ibu.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Saya ada usulan Ketua ada baiknya memang seperti pendapat Pak Ketua karena ini sudah siklus anggaran Ibu Menteri membacakan dulu membacakan saja pagu indikatif tetapi dengan catatan supaya kita ini tidak larut dengan 21.000.000 ya. Yang Ibu perlu Ibu persiapkan adalah yang bermasalah di PKH 10.000.000 KPM itu berapa yang bermasalah di BPNT dari 18.500.000 itu berapa yang bermasalah di 9.000.000 BST itu berapa nanti supaya clear Bu setelah ketemu berapa yang bermasalah itu baru kita umumkan ternyata bukan 21.000.000 Ibu harus sampaikan supaya kita ini *clear* yang menerima. Selama ini sebetulnya bukan 21.000.000 yang bermasalah dari 21.000.000 itu sekian di BPKH sekian di BPNT sekian di BST. Itulah baru kita pahami kalau sekarang tdiak bisa kita pahami ini.

Saya sebetulnya sepakat dengan Pak Iskan tadi masih ada babak kedua sebetulnya Bu pertanyaan kami tidak boleh menemukan data di meja di komputer langsung kita eksekusi tidak boleh kami sudah menemukan di lapangan bahwa Himbara itu memang bersiasat tidak mau menyalurkan padahal jelas ada orangnya tertumpuk disitu uang Rp230.000.000.000,- dan itu lama 3 tahun kemana mereka buat itu hasilnya tidak ada sementara orang yang kaya tetap dia salurkan tapi kan sedikit itu yang tersimpan banyak itu sudah kita temukan. Karena itu kami masih belum bisa memahami 21.000.000 karena yang kita urus adalah urusan bantuan sosial supaya orang memahami Bu ini saya kasihan ini Pak Hartono ini kasihan juga saya kasih tahu sedikit Pak Hartono sama Ibu Menteri Indonesia lho Bu begini lho kasih tau datanya jangan diam saja Pak Hartono.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Jadi begini Pak mohon maaf di awal itu memang yang saya bicarakan itu data DTKS. Jadi saya tidak ngomong pencairan dan data itu di awal itu data DTKS kalau data DTKS itu profilnya seperti ini.

KETUA RAPAT:

Tapi gara-gara itu banyak komentar Bu di media itu saya baca ini penikmatnya banyak salah satunya DPR disebut disitu ini bukan Ibu tapi ada pengamat dan politisi juga yang ngomong Bu

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Saya tidak pernah ngomong begitu Pak.

KETUA RAPAT:

Nah oleh karena itu supaya kita tidak liar kita klarifikasi mungkin begitu Bapak Ibu Anggota kita kasih kesempatan Bu Risma Bu Menteri untuk menyampaikan anggaran tahun 2022. Tapi dengan catatan tadi data ini kita *clearkan* dulu terutama data penerima manfaat yang sudah disalurkan Bu begitu ya setuju? Ya baik silakan Bu pengantar anggaran tahun 2022 dan evaluasi anggaran dan yang sudah berjalan silakan Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Terima kasih Bapak jadi Pagu Indikatif kami Rp72.256.327.121.000,- turun 15.35% dibandingkan tahun anggaran.

KETUA RAPAT :

72 atau 78 Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Rp78.256.327.121.000 turun 15.35% dibandingkan anggaran tahun 2021 sebesar Rp92.445.833.789.000,- kemudian anggaran per program yaitu program perlindungan sosial itu Rp76.000.000.000,- yang terdiri dari belanja Bansos dan ada berapa PKH itu Rp88.000.000.000 sekian kemudian kartu sembako Rp45.000.000.000,- sekian ini yang belanja Bansos.

Kemudian belanja operasional barang kurang lebih ada Rp235.000.000.000,- jadi ini rinciannya per Dirjen jadi kalau 2021 Sekjen itu 1.9 kemudian tahun ini 384 kemudian untuk program perlindungan sosial itu 73 sehingga untuk dukungan manajemen 311.

Kemudian untuk Irjen itu Rp38.000.000.000,- saat ini Rp37.000.000.000,- sekian kemudian Dirjen Dayasos itu semula 391 saat ini 382 kemudian Resos semula 1.2 saat ini 1.097 kemudian Dirjen Linjamsos ini 30.6 saat ini 30.6 tetap kemudian Dirjen PFM 57 2021 2022 45.400 sekian kemudian Badiklit Pensos 329.5 menjadi 306.5 anggaran yang di PFM itu turun tajam karena BST tidak ada BST tidak ada kemudian Rutilahu yang belum.

Nah kemudian di Dirjen ada beberapa Item yang mungkin saya langsung saja ke yang belum ada jadi yang belum ada karena sudah ada pagu masing-masing sehingga ya saat ini mohon maaf. Jadi contohnya misalkan nah yang Dayasos itu kemarin belum ada anggarannya ada di pengembangan kewirausahaan sosial bagi penduduk miskin ini karena sudah ada pagu-pagu seperti itu Pak ini belum ada anggarannya.

Kemudian ada itu yang berkurang itu seperti itu kira-kira Pak Bapak kemudian outputnya jadi kita mencoba Pak bagaimana dengan anggaran

yang turun itu kita mencoba membuat output yang berbeda. Jadi contohnya misalkan tahun ini kami mohon izin kami merevisi untuk dari gedung kemudian ke bantuan untuk disabilitas itu kurang lebih Rp50.000.000.000,- ini yang kami berharap sebetulnya tahun depan itu ada bantuan untuk tunanetra tongkat itu kemudian akses untuk roda tiga itu kemudian ada kursi roda kursi roda ada tiga jenis yang kita bisa buat sendiri dan itu dikerjakan oleh para penerima manfaat yang disabilitas pula.

Jadi mereka membuat itu *monggo* nanti kalau mau dilihat jari mereka penyandang disabilitas kita pekerjaan untuk membuat apa namanya membuat kursi roda elektrik kemudian kursi roda untuk *cerebral palsy* kemudian kursi roda untuk *hydrocephalus* ini kami buat kemudian ada tongkat untuk tunanetra tongkatnya itu kalau ada apa namanya kalau ada panas ada kendaraan lewat itu bisa terdeteksi.

Jadi kami berharap anggaran ini bisa di-*support* Pak karena dari data kita ada kurang lebih penduduk disabilitas kurang lebih ada 80.000.000 lebih 28.000.000.000 penyandang disabilitas yang tidak mampu. Jadi ini kemarin Pak mohon izin sekali lagi ini penyandang disabilitas kita masukan juga yang belum terima BPNT kita masukan. Saya lupa tadi laporkan jadi ini kita masukan Pak baru jadi peserta baru ini kita masukan kemarin. Saya mohon izin sekali mohon maaf sekali mohon maaf sekali karena kami kemarin pinginnya mereka segera mungkin karena mereka kondisinya sangat berat yang mereka tidak masuk PKH tapi tidak masuk juga BPNT. Jadi ini yang kami ajukan Pak.

Jadi seperti itu jadi kalau kita bandingkan target ini seperti ini kira-kira Pak. Jadi untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial jadi tahun 2021 itu 150 dunia usaha kemudian 2022 200 dunia usaha kemudian sistem layanan rujukan terpadu itu 300. Kemudian menjadi 364. Kemudian untuk Puskesmas pengembangan pusat Kesejahteraan Sosial dari 600 menjadi 728 desa kemudian untuk peningkatan PSM ini memang saya pelatihan-pelatihan coba saya kurangi Pak supaya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat lebih banyak.

Jadi ini target ini meskipun dana kita turun tapi target kita kita perbesar karena saya mengurangi dana untuk pelatihan-pelatihan. Jadi kita bisa lakukan dengan daring dan kemudian bisa kita gunakan anggarannya untuk bantuan cuma ini ada masalah untuk yang pengembangan kewirausahaan sosial untuk yang semula Rp8.000,- ini dibukan kami Pak yang kosong apa namanya mengosongkan, padahal waktu itu sudah saya jelaskan ke Bappenas kalau kami arahnya bukan memang bukan bantuan tapi kami membantu pemberdayaan. Jadi maksudnya jadi kami misalkan mereka butuh alat untuk usaha maka kami membantu alat untuk usaha memang bukan modal karena kalau modal itu apa namanya kemudian rata-rata dan kemudian kita kuatir kalau tidak digunakan untuk peralatan sehingga mereka mengajukannya peralatan Pak yang tahun ini kita buat seperti itu. Tapi kemudian dihapus Pak ini dihapus karena mungkin dikira modal kemudian KPM yang ini mendapatkan usaha kewirausahaan ini pengembangan dari kita dari PKH yang kita latih jadi begini Pak. Sekarang kita sistemnya membuat bahwa misalkan disini ada data PKH dari Linjamsos disitu dia punya usaha

maka kemudian yang menangani pemberdayaannya adalah dari Dayasos seperti itu.

Jadi data ini kita bawa ke sini begitu Pak. Jadi bukan apa namanya bukan secara sendiri jadi data yang ini kita bawa ke apa namanya ke Dirjen lain, supaya ada kesinambungan. Kemudian untuk pemberdayaan komunitas adat itu 250 komunitas kemudian menjadi 2022 menjadi 3500 komunitas. Kenapa anggarannya sama? Karena itu tadi yang kami sampaikan bahwa kami mencoba bagaimana mengurangi biaya-biaya yang apa namanya untuk bantuan kepada masyarakat.

Kemudian untuk yang Rehsos ini jadi peralatan dan mesin pada Dirjen Rehsos. Jadi ini peralatan contohnya misalkan untuk membuat kaki palsu sudah sangat kuno sekali sehingga kemudian kami mengajukan peralatan untuk itu. Kemudian ini penyalahgunaan rekomendasi penanganan penyalahgunaan hapsa kemudian asistensi untuk Peksos kemudian pendataan hapsa, kemudian lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas hapsa, kemudian pendamping ini memang kemarin nol tapi kemudian kita tangani bersama-sama. Karena kita sudah bisa ternyata di beberapa lokasi kita bisa menangani anak-anak kena napza kemudian mereka bisa berubah perilakunya.

Kemudian yang berikutnya untuk disabilitas, penyandang disabilitas. Jadi ini kita arahkan untuk bagaimana kita memperbanyak Pak. Jadi contohnya misalkan selama ini berapapun berapa 2.4 ini sekarang kita sesuaikan dengan kebutuhannya mereka jadi kebutuhan mereka apa kita bantu contohnya ada yang memang lebih dari 2,4 ini kita arahkan seperti itu.

Kemudian ini pendamping ini untuk pendamping-pendamping yang sebagian besar adalah OS. Kemudian literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra jadi ini yang kita buat karena saat ini kita bekerja sama kami dibantu banyak sekali dari institut telkom printer untuk kita bisa cetak kalau kami bisa memiliki banyak untuk beberapa daerah maka penyandang disabilitas netra bisa memaksimalkan kapasitasnya karena mereka bisa belajar dengan buku-buku yang kita siapkan.

Kemudian ini semua untuk Rehsos jadi untuk anak terlantar dan sebagainya. Kemudian untuk lanjut usia jadi kami nanti juga mohon izin Pak nanti tahun depan mungkin kalau diperkenankan kami akan membuat Posyandu lansia. Posyandu lansia itu ada di desa-desa dan di kota-kota sehingga para lansia itu bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan dasar disitu

Jadi pelayanan dasar seperti itu kemudian berikutnya adalah Dirjen Linjamsos jadi ini sama Bapak ini yang kenapa yang peningkatan kapasitas untuk ini yang *training-training* itu kita hapus Pak karena kita arahkan untuk yang bantuan untuk masyarakat jadi seperti itu.

Yang contohnya misalkan untuk apa namanya bencana kemarin anggaran yang di kami kurang lebih ada sekitar Rp100.000.000.000,- itu ternyata masih kurang sehingga kami mengambil dari beberapa wilayah. Contohnya misalkan dulu rencana pengadaan *truck* saya hapus nanti pengadaan truknya saya serahkan ke Sekjen yang rubah saya. Mohon izin Pak yang kita rubah karena ada pembangunan baru yang menurut saya

nilainya terlalu berlebih sehingga saya trcuknya saya alokasikan. Plus, saya mohon izin kami akan menyiapkan 44 ambulans Pak yang kita sebar seluruh Indonesia itu nanti digunakan 24 jam. Kami sudah menyiapkan biaya operasionalnya karena terus terang Pak kami melihat ada yang kemarin disini saja di dekat sini di Tangerang saja jenazah dibawa pakai motor. Nah harapan kita itu tidak kerja. Jadi sehingga mereka bisa menggunakan ambulans itu 24 jam kita sudah disiapkan untuk sopir dan perawatnya 24jam dan nah ini yang ini yang kita berikan.

KETUA RAPAT:

Itu masuk Tupoksi Kementerian Sosial atau bagaimana Bu?

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Tidak Pak nanti itu di balai Pak di balai. Jadi di balai untuk layanan itu tapi masyarakat boleh memakai karena kalau bayarnya mahal itu kasihan mereka tidak bisa banyak yang tidak bisa. Mobil jenazah ya sebetulnya mobil dengan mobil jenazah Pak. Tapi kami tidak ada anggarannya sehingga ambulans mungkin di kita bisa fungsikan juga mobil jenazah kalau mobil jenazah kami juga seperti itu.

Kemudian Dirjen PFM jadi ini rehabilitasi rumah tidak layak huni jadi yang semula 9.000 KPM tinggal 3.000.000 KPM Pak ini sebetulnya sangat banyak membutuhkan kemudian untuk BPNT itu 18.000.000 tetap 8.8 kemudian Bansos tunai yang ini tidak ada Pak BST yang semula ada menjadi tidak ada.

Kemudian untuk Badiklit ini kemampuan keluarga. Jadi bagi pendamping dan ada kurang lebih 80 orang disini tidak ada karena saya minta memang lebih fokus untuk pelayanan kepada masyarakat karena anggaran kami turun seperti itu kira-kira Pak. *Matur nuwun.*

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup ya para Anggota ya kita sudah mendengarkan pengantar anggaran termasuk sandingan tadi dengan sebelumnya kita akan perdalam. Tetapi dengan catatan tadi Bu ya, datanya kita *clearkan* dulu supaya nanti landasan kita sangat kuat, kalau tidak nanti rebut lagi di publik kenapa DPR sama Kemensos buat anggaran yang sama tapi datanya masih itu.

Saya kira kita bacakan dulu kesimpulan rapat karena ini pengantar memang tidak dibahas kalau anggaran Bu nanti para Eselon I yang akan membahas sama Komisi VIII *insyallah* tanggal 7 ya baik coba ditampilkan dulu kesimpulan rapat yang dengan agenda verifikasi dan validasi data 2 rapat 2 kesimpulan ini Bu, jadi biar ada kita pegang hasilnya. Ini bukan kurang anggaran kurang sinyal bagaimana saya mau membacakan ini.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Pimpinan Pak Ketua usul tadi lupa langsung habis tadi, tadi kami sambil nunggu dskusi sama Pak Samsu sama Pak Kyai. Badan Pendidikan dan Pelatihan itukan ada program penyuluhan sosial kita minta kepada Bu Menteri dan Pak Dirjen kalau bisa karena kita DPR ini selalu turun ke masyarakat kami selalu bersosialisasi. Kalau bisa di point ini dibuat atau per tahun atau 5 6 kali Ketua.

KETUA RAPAT:

Tidak nanti dibahas disana saja nanti.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Nah itu tapi gambaran sama Bu Menteri nanti kita bahas sama Pak Dirjen ditolak pula kan itu gambarannya Pak Bu.

KETUA RAPAT :

Baik kita baca dulu draft kesimpulan untuk rapat kerja yang dengan agenda verifikasi dan validasi data.

Draf Kesimpulan
Rapat Kerja

Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia
tentang Pembahasan Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di
Indonesia Permasalahan dan Alternatif Solusinya
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020/2021
Kamis 3 Juni 2021 ini hasil lanjutan tanggal 24 Mei 2021.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial sebagai lanjutan dari Rapat Kerja tanggal 24 Mei 2021 dengan agenda pembahasan kebijakan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia permasalahan dan solusinya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Komisi VIII DPR RI belum dapat memahami penjelasan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai data 21.000.000 penerima manfaat bantuan sosial yang ditidurkan karena di satu sisi datanya ditidurkan tapi disisi lain bantuan terhadap mereka tetap disalurkan. Baik untuk program keluarga harapan, PKH Bantuan Pangan Non Tunai BNT Bantuan sosial Tunai BST oleh sebab itu Komisi VIII DPR RI meminta Menteri sosial Republik Indonesia untuk memberikan klarifikasi kepada publik bahwa data yang ditidurkan tidak termasuk bantuan anggaran bansos yang telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial Republik Indonesia untuk merapikan data 21.000.000 penerima manfaat bantuan sosial secara

transparan dan akuntabel agar tidak ada lagi data di kemiskinan yang tidak valid dalam New DTKS.

3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial Republik Indonesia untuk bersinergi dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Ketua apakah kata new itu bisa Indonesia saja begitu kesannya itu rapat masih pakai bahasa Inggris sebagian begitu itu nomor 2 ada new DTKS bisa tidak Bu istilahnya DTKS yang baru begitu bisa ya.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Ibu sebelum saya lempar ke Menteri kesimpulan ini intinya kita masih memberikan kesempatan Bu Menteri untuk menyajikan data secara terperinci dari 21.000.000. Itu berapa yang kena ke PKH kemudian BPNT dan BST nanti baru Kementerian Sosial mem-*publish* itu kepada publik supaya nanti kita membahas anggaran bisa sejalan dengan data yang disajikan.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Pak Ketua, memang tadi itu penyuluh sosial itu penting sekali Pak pelatihan penyuluh sosial itu bagus sekali karena ini kemitraan itu supaya betul-betul ya nanti supaya betul-betul dipertegas.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Baik ini Pak apa namanya saya juga mohon maaf karena tidak baik nanti kami rubah yang usulan ini.

KETUA RAPAT:

Detailnya kita bahas dipuncak nanti Bu sama Eselon I tadi saya bacakan draf kesimpulan tentang validasi data Bu ada di meja Ibu mungkin bisa di sudah setuju ada perbaikan Bu yang new itu diganti baru tadi ya.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Belum dapat memahami ini masih memerlukan penjelasan.

KETUA RAPAT:

Komisi VIII masih memerlukan penjelasan bagus juga bahasanya ya itu kasih masukan yang pas begitu masih ada Bu Pak Sekjen cukup Bu yang data.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Iya Pak tidak apa-apa orang saya sebetulnya tidak pernah membicarakan apapun. Hanya saat itu karena mohon maaf saya tidak bicara itu kemudian saya keluarkan tetapi tidak ada sama sekali menyangkut data dari pencairan apa tidak saya hanya karena yang disampaikan itu selalu DTKS DTKS begitu seperti itu Pak saya harus menyampaikan itu.

KETUA RAPAT:

Oke Bu. Makanya ini kita bantu Ibu ini Bu pasti Bu kita pokoknya sama-sama Bu ya baik jadi yang kesimpulan dari verifikasi dan validasi data cukup Bu Menteri kita setuju.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Intinya sih kompak-kompak kalau orang Medan bilang.

KETUA RAPAT :

Oke ya tanpa saya bacakan lagi draft yang saya simpulkan tentang verifikasi dan validasi data bisa kita setuju sebagai kesimpulan rapat kerja setuju ya baik.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, sekarang saya bacakan draf kesimpulan RAPBN Bu Menteri sudah pegang Bu sudah ya baik saya bacakan.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Pak *nyuwun sewu* Pak belum saya mohon yang.

KETUA RAPAT:

Baik, ini sama-sama kita perbaiki nanti Bu Menteri kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki termasuk Pimpinan dan para Anggota.

Draf Kesimpulan
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik
Indonesia
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020 2021
Kamis 3 Juni 2021

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan agenda pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP Tahun 2022, evaluasi tahun anggaran 2020 dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 disimpulkan sebagai berikut.

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- dengan rincian alokasi sebagai berikut Sekretaris Jenderal sebesar Rp354.695.71.000,- Inspektorat Jenderal sebesar Rp37.111..640.000,- Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp382.258..519.000,- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.097.154.258.000,- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp30.636.942.086.000,- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp45.441.597.456.000,- Badan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp306.524.267.000,-

Pagu Indikatif Kementerian Sosial Tahun 2022 ini turun sekitar 15.3% dibandingkan dengan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2021 sebesar Rp92.445.833.789.000.

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian SosialTtahun 2020 sebesar Rp130.288.443.380.820,-
3. Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Sosial tahun 2001 yang sampai tanggal 2 Juni 2021 mencapai Rp43.698.694.710.920,- atau sebesar 47,26% dari Pagu anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp92.445.011..633.000,-
4. Nomor 4 ini tambahan saja Bu mempertegas tadi dari kesimpulan rapat tentang data pembahasan lebih lanjut mengenai RAPBN akan dilanjutkan setelah DTKS baru selesai.

Jadi mungkin dalam 1, 2 hari ini Bu kalau bisa diselesaikan sebelum rapat di puncak itu sudah kita berlandaskan data yang bagus dengan BPKP BPK kemudian Jaksa dan KPK itu benar-benar kita mulai *clearkan* gimana Bapak Ibu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Nanti untuk DTKS karena memang perlu khusus Pak saya mendalami ini sampai jam 1 pagi hampir tiap hari Pak, jadi maksud saya kalau kami undang khusus untuk bahas masalah data sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa dapat gambaran *clear* tentang itu kalau saya diperkenankan mungkin Senin saya undang dulu kemudian baru setelah itu dengan teman-teman kalau itu disepakati seperti itu supaya harus khusus Pak.

KETUA RAPAT:

Kami mungkin nanti rapat dengan Kapoksi dengan Pimpinan skenario bagaimana yang penting begini Bu kita sudah 1 nafas bahwa data itu penting Bu jangan sampai data yang salah kita pakai kira-kira begitu Bu ya nanti kita rapat di internal kami Bu dan Ibu juga konsolidasi di internal Ibu nanti baru kita koordinasi Bu ya. Bagaimana Ibu tadi?

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Ini ada ajuan Pak contohnya yang misalkan RTLH kebencanaan itu kemudian penyuluhan sosial dari Badiklit kemudian juga yang Dayasos untuk penguatan strategi yang semula kosong ini ada usulan kami Pak kalau diizinkan.

KETUA RAPAT:

Tidak apa-apa Bu nanti diusulkan saja di konsinyering karena ini fraksi-fraksi harus dengar juga Bu yang jelas katanya Ibunya setuju begitu Bu.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Lho ini usulan saya kalau saya anu saya yang baca saya yang baca tadi kelupaan Pak.

KETUA RAPAT:

Begini saja Bu yang saya bacakan ini global semua Bu global yang apa namanya bagaimana Bu dari yang saya bacakan mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ada perbaikan Bu. Tapi dari angka-angka kita meniru angka-angka dari Kemensos semua ini.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Terhadap Pagu alokasi Pagulindikatif 2022 yang ada masih dibutuhkan tambahan anggaran untuk penguatan pengawasan perencanaan pemberdayaan

sosial dan kebencanaan kemudian untuk rehabilitasi sosial rumah Rutilahu dan untuk disabilitas. Nanti kami lampirkan usulannya begitu 1 kata.

KETUA RAPAT:

Nanti detailnya nanti Pak Sekjen inikan baru glondongannya tidak ini kita Cuma bahas pengantarnya saja Pak nanti detailnya kita bahas per Eselon I nanti termasuk nanti dari kita juga akan berkembang begitu ya? Bagaimana Bu setuju ya?

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Keatas ke pengantar supaya sinkron dengan keputusan yang pertama mengenai data mengenai DTKS. Maka karena itu kalimatnya sama masih memerlukan penjelasan karena disitukan masih dicantumkan anggaran 10.000.00 KPM PKH masih dicantumkan 18,8 KPM BPNT karena itu kita masih memerlukan penjelasan mengenai Pagu Indikatif tidak. Jadi tidak bisa karena di dalamnya ada Pak.

KETUA RAPAT:

Di lampiran Ibu di catatan memang ada Rp10.000.000 PKH dan 18,5 BPNT. Ini mungkin tadi kita tanya lagi ke data tadi Bu tapi ini tidak mengganggu Pagu indikatif tapi perlu penjelasan saja nanti bagaimana Bu Pak?

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Sebenarnya di poin 4 akhir sudah ada itu Pak sebenarnya kalau Pagu Indikatif sudah ditentukan ini dari Kementerian Keuangan sama Bappenas.

KETUA RAPAT:

Makanya kita kunci di angka 4 itu Pak Marwan angka 4 itu pembahasan lebih lanjut begitu setelah data *clear*.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Pilihannya 2 Ketua menyetujui atau memahami kita baru memahami. Nah jadi menurut saya bahasa tadipun sudah sedikit keras juga Pak Marwan.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Ini bukan persoalan keras lembut ini.

KETUA RAPAT :

Oke kembali ke laptop jadi dapat memahami oke Pak Bu Menteri memahami ya Baik Bapak Ibu.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Sedikit Pak kalau kita dapat memahami tadikan begini Bu Menteri inikan dari Kementerian Keuangan pagu indikatif ini masih berdasarkan angka bantuan sosial tentang data itu sebetulnya Ibu perlu menjelaskan yang 21.000.000 bukan tidak memahami tentang itu tetapi kalau dengan data yang salah memahami tadi itu. Itu pelanggaran itu jadi harus kita buat di situ dari kementerian keuangan itu memahami tapi dalam hal menuju kepenetapan kita butuh penjelasan itu kan membahas Ketua masuk di Kopo itu sudah berjalan.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Begini Pak Ketua sedikit Pak Ketua saya sedikit agak memahami yang Pak Marwan Dasopang Kementerian sosial membuat sistem data dengan anggaran. Tapi kita lihat dalam penyampaian itu tidak sesuai begitu ya jadi begitu bicara data tidak ada masalah tapi begitu anggaran tidak tercermin kalau umpamanya masih bermasalah data itu ini masalah apa namanya konsistensi saja Bu. Kalau Ibu merasa umpamanya ada sekitar 3.000.000 yang bermasalah data ini akan mengalami perubahan anggaran itu maksud saya konsistensi masalah data dan anggaran.

Karena kami di DPR adalah politik anggaran kami juga harus konsisten dengan yang Ibu ajukan begitu yang dimaksud Pak Marwan Dasopang barangkali jadi itu tidak terlihat dalam penyampaian Ibu. Kalau itu kan jadi tidak tahu ini antara omongan Ibu tidak dipahami Eselon I seharusnya harus dipahami kalimat Menteri itu konsekuensinya begini karena DPR itu lembaga politik. Jadi konsekuensi anggarannya ada begitu.

KETUA RAPAT:

Begini Pak Iskan, jadi kita sekarang ini bahasa Pagu Indikatif tapi kita tahu ada masalah besar sebenarnya makanya kita kunci di angka 4 itu Pak.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Supaya pemahaman kita sama itu politik anggaran Pak, Menteri itu kita akui konsistensi kita tidak ada masalah angka 21 itu bagi kita tidak baru

datang tapi konsistensi antara politik anggaran Menteri dengan data kita itu tidak konsisten itu yang kita mau.

KETUA RAPAT:

Makanya nomor 4 itu kita minta DTKS yang *clear* itu menjadi landasan utama kita Pak Sekjen. Kalau tidak kita tidak akan lanjut pembahasannya begitu ya.

F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Siap Ketua. Jadi begini boleh kita hanya mempertahankan di poin empat. Tetapi kembali seperti yang disampaikan Pak Iskan bahwa Ibu Menteri dengan inikan tidak konsisten atau katakanlah tidak 21.000.000 hanya 3.000.000 saja artinya tidak lagi 10.000.000 KPM-nya Pak sudah menjadi 7.000.000 atau katakanlah berbagi antara PKH dengan BPNT. Karena sekarang tidak lagi ada BST mestinya berkurang dong ajuannya kira-kira begitu tapi katanya tidak berkurang begitu.

KETUA RAPAT:

Tidak kan ada data 56.000.000 tadi Pak tidak bisa nyusul data baru yang penerima kan begitu Bu ya? Mudah-mudahan yang membutuhkan begitu.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Maksudnya Pak Ketua itu yang benar artinya yang.

KETUA RAPAT:

Jadi data yang bermasalah dibersihkan masuk ke data yang baru yang biar tidak tumpang tindih.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

56.000 Pak tidak sampai 3.000.000 artinya Ibu ini tidak konsisten dengan temuan sekalipun 21.000.000.

KETUA RAPAT:

56.000.000 dari 131.000.000 yang saya bersihkan yang sudah bersih itu 56.000.000 DTKS. Makanya kita bedah lagi berapa di PKH di BPNT dan

BST nanti kita elaborasi lagi dari anggaran yang ada ini sebenarnya buat berapa PKH buat berapa BPNT dan yang lainnya begitu. Setelah data *clear* makanya kita kunci di nomor 4.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Antara PKH dan BPKH sama-sama menyalurkan dan disini juga jadi tidak apa-apa salah Ketua.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Data tadi yang 3.000.000 secepatnya Kementerian Sosial mengganti data baru supaya.

KETUA RAPAT:

Dan itu kebutuhan Bu Menteri supaya itu bersih itu sama dengan kebutuhan kita.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Baik nanti Senin insyallah kita selesaikan.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak Ibu ya kan bisa Senin pagi, Senin siang kita bahas kan tinggal waktu ini.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Apa minggu tidak apa-apa saya serahkan kalau minggu kami sudah mulai Januari Pak. Sabtu-Minggu kerja iya kemarin libur juga kita kerja.

KETUA RAPAT:

Intinya kita terima nanti data yang sudah disajikan itu benar-benar bersih dan itu landasan kita membahas di Kopo begitu Pak Sekjen ya, Para Dirjen. Baik Bapak Ibu terhadap draf kesimpulan yang sudah saya bacakan ada tadi perdebatan dan sudah kita simpulkan redaksinya sudah diperbaiki apakah draf yang saya simpulkan tanpa saya bacakan lagi bisa saya ambil sebagai kesimpulan setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, silakan Bu Menteri kata akhir dari Rapat Kerja ini sebelum saya tutup kami persilakan.

MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):

Terima kasih.

Yang saya hormati Ketua beserta Wakil Ketua serta anggota Komisi VIII.

Terima kasih atas pembahasan ini tapi Insya Allah tidak ada niatan apapun hanya saat itu memang harus segera mengeluarkan ini dan itu tidak ada sangkut pautnya karena memang ada kondisi-kondisi yang saya harus lakukan.

Jadi tidak ada Insya Allah tidak ada untuk melewati siapa pun untuk melaporkan. Ini saya kira begitu terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan insyallah kalau misalkan Minggu kami akan siapkan supaya Senin kami akan siapkan hari Minggu seperti itu *matur nuwun*.

KETUA RAPAT:

Ya bisa nanti skenario kalau sudah di Puncak ya Senin pagi di Puncak kita bahas dulu data baru lanjut dengan pembahasan itu banyak skenario nanti kita koordinasikan saja Bu ya.

Baik Bu Menteri beserta seluruh jajaran para Anggota dan pimpinan terima kasih sudah mengikuti rapat kerja ini dengan baik mudah-mudahan kekompakan kita ini menuju sebuah impian kita semua bahwa Kemensos hadir itu benar-benar tepat sasaran dan tepat guna utamanya anggaran yang akan kita bahas di tahun 2022.

Sekali lagi terima kasih mohon maaf bila ada kekurangan dengan mengucapkan *Alhamdulillah* Rapat Kerja ini saya nyatakan ditutup.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

RAPAT DI TUTUP PUKUL 16:53 WIB

**Jakarta, 3 Juni 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**